



**KERANGKA ACUAN KERJA**  
KEGIATAN DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN PNS



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**2019**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN PNS  
SE-JAWA TENGAH  
TAHUN 2019**

---

**A. LATAR BELAKANG**

• **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 18 Juli Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

• **Gambaran Umum**

Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian merupakan sebuah subsistem yang memiliki banyak kegunaan terutama bagi instansi pemerintah, dikarenakan seluruh proses kegiatannya selalu berhubungan dengan proses administrasi kepegawaian, seperti halnya BKD Provinsi Jawa Tengah

Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah telah dirintis pengembangannya sejak tahun 2002. Dengan bergulirnya reformasi birokrasi, pengembangan Simpeg menjadi hal yang krusial untuk mendukung agenda reformasi birokrasi khususnya pada peningkatan manajemen SDM.

Dan pada tahun 2009 Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengembangkan sebuah sistem pengelolaan kepegawaian yang diberi nama SAPK (Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian) sebagai suatu sistem pengelola data kepegawaian PNS seluruh Indonesia dan mengharuskan seluruh proses pengelolaan kepegawaian di tingkat pusat maupun daerah menggunakan sistem tersebut.

Jika dibandingkan dengan Simpeg Pemerintah Daerah yang telah menjadi sebuah sarana vital dalam proses pengelolaan kepegawaian, SAPK merupakan sistem 'baru' yang bahkan sampai dengan saat ini belum mampu memenuhi keberagaman kebutuhan informasi kepegawaian yang ada di daerah seperti halnya Simpeg.

Oleh karena itu, sejak tahun 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan Sistem Aplikasi e-File yang merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk mengelola dokumen kepegawaian baik tekstual maupun digital seluruh PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ke depan digunakan untuk proses kepegawaian secara *paperless*.

Aplikasi e-File Kepegawaian mempunyai misi seluruh proses kepegawaian di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara paperless, dan untuk ke depan seluruh dokumen kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota akan sinkron dengan aplikasi DMS (Document Management System) BKN.

Guna Mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2015 BKD Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan Sharing Aplikasi e-File untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diharapkan agar seluruh Kabupaten/Kota dapat menyamakan persepsi pengelolaan dokumen kepegawaian dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan BKD Provinsi Jawa Tengah mengembangkan aplikasi e-File tersebut dengan dasar dan pedoman dari BKN.

BKN Pada Tahun 2019 memang merencanakan akan membuat sebuah sistem portal dokumen kepegawaian seluruh PNS di Indonesia, dengan harapan seluruh dokumen kepegawaian PNS seluruh Indonesia sudah tercover secara digital, dan seluruh proses kepegawaian bisa dilaksanakan secara paperless, agar lebih mempercepat proses administrasi kepegawaian.

Guna mengoptimalkan hal tersebut, perlu dikembangkan sebuah sistem dengan mekanisme yang dapat mengampu seluruh perbedaan dan permasalahan yang ada terutama dalam hal pengelolaan dokumen kepegawaian menjadi dokumen digital yang dimiliki oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga untuk pelaksanaan penerapan pengelolaan dokumen digital SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diadakannya pengembangan aplikasi e-file yang lebih kompatibel untuk pelaksanaan tersebut guna mewujudkan tercapainya sebuah sistem dokumen digital PNS se-Jawa Tengah yang akurat dan kompatibel.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### 1. Maksud

Pelaksanaan Bimbingan Teknis e-File PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 ini dimaksudkan untuk pemenuhan layanan kepegawaian secara paperless dan meningkatkan kompetensi tenaga pengelola dan pemanfaatan e-File SKPD.

### 2. Tujuan:

- a. Terjadinya proses transfer informasi mengenai teknologi informasi dan standar pengelolaan aplikasi e-File sesuai kebutuhan organisasi.
- b. Terbentuknya kesamaan pemahaman, pola pikir dan pola tindak antara pengelola pada setiap SKPD dan pengelola pusat data e-File di BKD Provinsi Jawa Tengah.
- c. Terkumpulnya data dokumen digital dari Aplikasi e-File sehingga lengkapnya seluruh dokumen kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara menyeluruh.
- d. Terselenggaranya kelancaran proses Kenaikan Pangkat secara Online untuk PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersumber baik dari Aplikasi Simpeg maupun dari e-File.
- e. Terpenuhinya langkah awal pengelolaan seluruh administrasi kepegawaian secara online dan paperless di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Guna mendukung tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud, Kegiatan Dokumentasi Kepegawaian PNS ini akan dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis e-File PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta inventarisasi permasalahan pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **D. SASARAN**

Sasaran dari kegiatan ini adalah para pengelola kepegawaian Kabupaten/Kota sejumlah 35 Kabupaten/Kota dan para pengelola kepegawaian Provinsi Jawa Tengah sejumlah 48 SKPD dengan harapan tercapainya sebuah mekanisme dan updating pengelolaan dokumen kepegawaian secara digital pada Aplikasi e-File Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung guna pengelolaan administrasi kepegawaian se-Jawa Tengah secara paperless.

## **E. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan Dokumentasi Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah ini berlokasi di Semarang Jawa Tengah.

## F. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	TAHUN 2019											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Belanja ATK												
2	Konsultasi/Koordinasi												

## G. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Dokumentasi Kepegawaian PNS adalah terciptanya sebuah mekanisme *updating* data dokumen Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah dengan dukungan pelaksanaan Bimbingan Teknis e-File PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memanfaatkan data Simpeg dan e-File sebagai sumber data guna mengatasi permasalahan pada dokumen kepegawaian yang ditolak dan persamaan persepsi dalam pengelolaan dokumen kepegawaian guna pelaksanaan proses kepegawaian secara paperless.

## H. ANGGARAN

Perkiraan kebutuhan anggaran sebagaimana terlampir.

## I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Kepegawaian PNS Tahun 2019.

**Semarang, Januari 2019**

**KEPALA BIDANG  
INFORMASI KEPEGAWAIAN  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**RR. UTAMI RAHAJENG, S.H., M.M.**

Pembina Tingkat I  
NIP 19700113 198903 2 002